

**PERANAN KEPALA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR JALAN PADA DESA PULAU SEJUK  
KECAMATAN DATUK LIMAPULUH  
KABUPATEN BATU BARA**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ARIFAH  
198520190**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/9/23

Access From (repository.uma.ac.id)8/9/23

**PERANAN KEPALA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR JALAN PADA DESA PULAU SEJUK  
KECAMATAN DATUK LIMA PULUH  
KABUPATEN BATU BARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di  
falkutas ilmu sosial dan ilmu politik universitas medan area*



**OLEH:  
ARIFAH  
198520190**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FALKUTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Peranan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara  
Nama : Arifah  
NPM : 198520190  
Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing



**Dr. Budi Hartono, M. Si**  
Pembimbing I



**Marlina Deliana, S.AB.M.AB**  
Pembimbing II

Mengetahui



**Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si**  
Dekan Falkutas Isipol



**Khairunnisah Lubis, S.Sos. M.Ipol**  
Ka. Prodi Administrasi Publik

Tanggal lulus : 23 Agustus 2023

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana adalah hasil dari proses penulisan saya sendiri, namun beberapa bagian dari skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain dengan sumber yang ditentukan sesuai dengan standar, aturan dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar sarjana dan sanksi lainnya, dengan peraturan yang berlaku jika di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 21 Agustus 2023



ARIFAH

NPM: 198520190

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR / SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area (UMA), saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Arifah  
NPM : 198520190  
Program Studi : Administrasi Publik  
Falkutas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Atas Royalti Noneksklusi (Non-ekclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Peranan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Bebas mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian penyampaian ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan,

Pada tanggal: 21 Agustus 2023



## ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan dalam proses pertumbuhan ekonomi. Adapun pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur jalan pada Desa Pulau Sejuk. Pembangunan dilakukan karena sebagian jalan masih banyak yang rusak, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui Peranan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Desa Pulau Sejuk dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat Peranan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Desa Pulau Sejuk. Untuk membantu peneliti menjawab rumusan masalah maka peneliti menggunakan teori Soekanto, Sulistyowati (2017) yaitu, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. Adapun teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2010), yang dilakukan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan kepala desa dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan sudah direncanakan dengan baik namun dalam pelaksanaan pembangunan jalan masih belum dilaksanakan dan untuk pengawasan secara langsung maupun tidak langsung kepala desa dengan aparat desa dalam pembangunan jalan belum terlaksana dikarenakan belum ada perbaikan jalan, Kepala Desa Pulau Sejuk harus memperhatikan pembangunan jalan agar pelaksanaan infrastruktur dapat berjalan dengan baik.

**Kata Kunci : Peranan, Pembangunan, Infrastruktur jalan**

### **ABSTRACT**

*The construction was carried out because many roads were still damaged, therefore the researcher was interested in knowing the Role of the Village Head in the Development of Road Infrastructure in Pulau Sejuk Village and describing the supporting and inhibiting factors of the Village Head's Role in Road Infrastructure Development. To help answer the formulation of the problem, the researcher uses Soekanto's theory, Sulistyowati (2017), namely, planning, implementing, monitoring. data collection techniques according to Sugiyono (2010), namely interviews, observation, documentation and qualitative analysis.*

**Keywords: Role, Development, Road Infrastructure**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Arifah lahir di Kota Lima Puluh pada tanggal 9 Februari 2000. Penulis merupakan anak ke-3 dari 3 bersaudara yang merupakan putri dari Ayahanda Aswan dan Ibunda Ngatiem.

Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis yaitu mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) Negeri 010185 Lima Puluh dan selesai pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (MtsN) di Madrasah Tsanawiyah Negeri Lima Puluh, selesai pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (MAN) di Madrasah Aliyah Negeri Lima Puluh, selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yaitu di Universitas Medan Area (UMA) dengan mengambil Program Studi S1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagimaha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapatdiselesaikan dengan baik. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syaratuntuk mencapai gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik UniversitasMedan Area.

Adapun judul skripsi ini adalah “Peranan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara “ .

Dalam penyelesaian skripsi ini dapat selesai tidak terlepas dari adanya dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effianti Juliana Hasibuan, M.Siselaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Khairunnisa Lubis, S.Sos, M.I.Polselaku ketua jurusan Program studi Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Budi Hartono, M.Si selaku Dosen pembimbing I yang sudah banyak mengarahkan penulis dalam membuat skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan dan arahan, dan amsukkan yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Marlina Deliana, S.AB,M.AB selaku Dosen pembimbing II yang sudah banyak mengarahkan penulis dalam membuat skripsi ini.

6. Bapak Fathin Abdullah, S.H.,M.HumSelaku Sekretaris yang sudah banyak mengarahkan penulis dalam membuat skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Program Studi Administrasi Publik dan para Staff Akademik dan Pegawai lainnya yang memberikan pengarahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
8. Kepada Bapak Kepala Desa dan Masyarakat di Desa Pulau sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.
9. Kepada kedua orang tua saya tercinta,Alm.Aswan (Ayah) dan Almh.Ngatiem (Ibu) ayah, ibu terimakasih dan kakak saya Sabarinah
10. Kepada Bapak Muhammad Ali Akbar yang telah banyak membantu dan mendukung selama proses perkuliahan.

Dalam menyajikan skripsi ini penulis menyadari masih jauh atau belum mendekati kesempurnaan, hal itu dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis.Oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan koreksi dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan masukan yang bermanfaat demi perbaikan dan peningkatan diri dalam bidang ilmu pengetahuan untuk menambah kesempurnaan skripsi ini..

Medan, 21Agustus 2023

Penulis



**ARIFAH**

**Npm: 198520190**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Pengertian Peranan .....	11
2.2 Pemerintah Desa .....	13
2.2.1 Kepala Desa.....	14
2.2.2 Sekretaris Desa .....	16
2.2.3 Bendahara Desa .....	17
2.2.4 Pengertian Pembangunan .....	18
2.2.5 Faktor Pendukung Dan Penghambat Peranan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan.....	19
2.3 Infrastruktur Jalan .....	21
2.4 Sistem Infrastruktur.....	22
2.5 Pengertian Desa .....	24
2.6 Otonomi Desa .....	26
2.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	28
2.8 Karangka Berpikir .....	31

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1Jenis Penelitian.....	34
3.2Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	35
3.3Informan Penelitian .....	36
3.4Sumber Data .....	37
3.5Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.6Defenisi Konsep Dan Oprasional.....	39
3.6.1Defenisi Konsep .....	39
3.6.2Defenisi Oprasional .....	40
3.7Teknik Analisis Data.....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
4.1Hasil Penelitian .....	44
4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian .....	44
4.1.2Sejarah Kabupaten Batu Bara.....	45
4.1.3Kondisi Geografis Kabupaten Batu Bara.....	46
4.1.4Demografis Kabupaten Batu Bara.....	48
4.1.5Kondisi Non Fisik Kabupaten Batubara .....	48
4.1.6Sarana Dan Prasarana Kabupaten Batu Bara .....	51
4.2Sejarah Kecamatan Datuk Lima Puluh .....	54
4.2.1Kondisi Wilayah kecamatan Datuk Lima Puluh .....	54
4.2.2Luas Wilayah Kecamatan Datuk Lima Puluh .....	55
4.2.3Keadaan Alam Kecamatan Datuk Lima Puluh.....	55
4.2.4Gambaran Umum Desa Pulau Sejuk .....	55
4.2.5Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan kepercayaan .....	56
4.2.6Infrografis P-APBDES 2022.....	57
4.2.7Kondisi Jalan Utama Kedesa Dan Pertanian.....	59
4.2.8Pemerintah Desa Pulau Sejuk.....	60
4.4 Pembahasan Penelitian .....	71
4.4.1Tingkat Umur Informan .....	71
4.4.2Identitas Informan Berdasarkan Pekerjaan .....	72
4.5Peranan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan .....	72
4.6 Peranan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.....	74
4.6.1Perencanaan.....	76

4.6.2 Pelaksanaan .....	81
4.6.3 Pengawasan .....	86
4.7 Faktor-Faktor Apa Yang Mendukung Dan Menghambat Peranan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.....	91
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>96</b>
5.1 Kesimpulan .....	96
5.2 Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan APBdes 2022.....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	35
Tabel 3.2 Daftar Informan.....	37
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Batu Bara .....	47
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Kecamatan .....	50
Tabel 4.3 Penduduk Berumur 15 Tahun keatas Yang Berkerja Menurut Status ..	51
Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana Yang Terdapat Di Kabupaten Batu Bara .....	52
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Desa Pulau Sejuk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	57
Tabel 4.6 Infografis 2022 .....	57
Tabel 4.7 Kondisi Jalan Utama Desa Ke Pertanian .....	59
Tabel 4.8 Jumlah Pemerintahan Desa Pulau Sejuk .....	62
Tabel 4.9 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur .....	71
Tabel 4.10 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir .....	33
Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data .....	43
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Batu Bara .....	44
Gambar 4.2 Struktur Organisasi .....	63



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	101
Lampiran 2 Surat izin penelitian .....	103
Lampiran 3 Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian .....	104
Lampiran 4 Dokumentasi penelitian.....	105





## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara telah banyak melakukan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan di dalam proses pertumbuhan ekonomi karena dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, sehingga menciptakan lapangan kerja baru, menurunkan tingkat kemiskinan. Pembangunan infrastruktur yang baik akan menjamin efisiensi dan dapat memperlancar pergerakan barang dan jasa.

Soekanto, Sulistyowati (2017) menjelaskan peranan adalah suatu konsep apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam organisasi dan peranan juga dapat sebagai perilaku individu yang penting bagi struktural sosial masyarakat, Adapun 3 indikator-indikator peranan menurut Soekanto, Sulistyowati diantaranya yaitu: Perencanaan merupakan proses menentukan tindakan masa depan secara tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang telah tersedia untuk mencapai tujuan yang diharapkan, Pelaksanaan merupakan suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataan dan Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan mendukung pencapaian hasil kinerja yang diharapkan sesuai dengan yang sudah direncanakan.

Peranan pemimpin merupakan kemampuan dan keterampilan teknis serta sosial seorang pemimpin dalam mengarahkan dan menggerakkan serta menerapkan pada praktek kehidupan dan praktek organisasi, yang meliputi konsep-konsep pemikiran, perilaku sehari-hari dan semua peralatan yang dipakai,

dan yang termasuk kategori teknik pemimpin yaitu antara lain etika profesi, kebutuhan dan motivasi (manusia), dinamika kelompok, komunikasi, kemampuan pengambilan keputusan, keterampilan diskusi dan lainnya. Pendekatan dan prinsip-prinsip pembangunan desa adalah menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi juga dinamis serta berkelanjutan dengan memperhatikan adanya keseimbangan kewajiban yang serasi antara kegiatan pemerintah dengan kegiatan masyarakat. Peran kepala desa sangat penting dalam keberhasilan suatu daerah, dalam pembangunan di wilayahnya, kepala desa merupakan perencana, pengawas, pelopor dan dinamisator. Sebagaimana diungkapkan Kartono (2010).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengamanatkan pada pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa “Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa” Selanjutnya pada pasal 26 ayat(1), Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Era reformasi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia, sejak pelaksanaan otonomi daerah yang berlaku di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan dimana pemerintah daerah diberi wewenang yang lebih besar dalam pengelolaan pembangunan di daerahnya masing-masing, sehingga kedudukan perencanaan semakin penting.

Pembangunan merupakan wujud pertanggung jawaban pemerintah terhadap pelaksanaan janji-janji politik yang banyak disampaikan dalam berbagai kontektasi pemilihan Pemimpin Daerah dan anggota legislatif. Setiap pemimpin

mempunyai peran yang sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan organisasi yang dipimpin untuk mengarahkan dan menggerakkan para bawahannya.

Desa berhak melaksanakan pembangunan, salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat karena desa mempunyai sarana dan prasarana atau infrastruktur yang layak dan memadai akan cepat berkembang, di banding dengan desa yang belum memiliki infrastruktur yang kurang menunjang pelaksanaan kegiatan masyarakat desa. Kegiatan pembangunan dari segala ukuran keberhasilan tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat. Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur karena Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu perencanaan, maka salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.

Maka dari itu peranan kepala desa pulau sejuk tentang pembangunan infrastruktur jalan merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, drainase, bangun-bangunan dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Pembangunan fasilitas publik yang memadai dapat meningkatkan perekonomian yang berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Menurut Teori Grigg (1988)

Pulau Sejuk merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Pada tahun 1955, Pulau Sejuk masih merupakan suatu daerah bagian yang berada di areal atau wilayah Pemerintahan Desa Lubuk Besar (Pemekaran). Selama ini di Desa pulau sejuk Kecamatan datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara pemerintah desa dipegang secara penuh oleh Kepala Desa untuk mengatur keputusan sendiri, bagaimana berjalannya infrastruktur desa, perekonomian desa, serta pemerintahan yang baik.

Tercatat pada Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara pembangunan infrastruktur jalan belum merata dan belum ada pembangunan kembali untuk jalan yang rusak. Panjang jalan yang rusak terdapat pada ruas jalan 500M sampai di persimpangan memasuki dusun pajak rabu perkiraan 78 M di perkiraan jumlah keseluruhan 1,648 M diharapkan dapat di perbaiki kondisi jalan sehingga terwujudnya bentuk jalan yang optimum berdasarkan pengukuran langsung dari peneliti. Selanjutnya sebagai bentuk dari keinginan yang kuat untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa pulau sejuk Kecamatan datuk lima puluh Kabupaten Batu Bara, dan diharapkan Kepala Desa menjadi penggerak ditengah-tengah masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dan menuju kearah yang lebih baik bagi masyarakatnya. Dengan demikian peranan dari seorang Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan tidak menutup kemungkinan akan berjalan baik karena adanya kerja sama antara Kepala Desa dan masyarakat. Pembangunan Infrastruktur di Desa Pulau sejuk ini adalah sangat penting dan meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sekaligus merupakan proses pengembangan

pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan Negara. Pencapaian dari penelitian ini menunjukkan peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan yang sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan agar lebih optimal, hal ini dapat dilihat pada aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan.

Menurut penelitian terdahulu Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, Wawan, 2021 Berdasarkan hasil penelitian diketahui Kepala Desa Pulau Busuk belum mampu menunjukkan perannya dalam membuat perencanaan pembangunan jangka menengah desa yang mengakibatkan masih banyaknya program RPJM Desa belum terselesaikan dengan tepat waktu. Kepala Desa Pulau Busuk sudah berperan cukup baik karena pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan perencanaan pembangunan. Tetapi dalam pelaksanaannya belum melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap dana desa yang dikeluarkan untuk satu kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut. Pengawasan pembangunan infrastruktur desa Kepala Desa Pulau Busuk memiliki peran yaitu melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan dimana lokasi pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan.

Dana Desa salah satunya diperuntukkan pada kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa, Instrumen terpenting dalam pembangunan yang harus disediakan ialah infrastruktur karena infrastruktur ialah kebutuhan dasar masyarakat. Berdasarkan hasil pra penelitian adapun masalah yang dihadapi dalam pembangunan tersebut adalah capaian kinerja pembangunan infrastruktur masih belum maksimal. Salah satunya dapat dilihat dari kondisi umum

infrastruktur yang masih kurang memadai, khususnya pada infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan di beberapa bagian.

Pemerintah Desa menyusun Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan dan pembangunan infrastruktur Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa yang melibatkan masyarakat Desa untuk bergotong royong guna membantu dalam pembangunan Desa dan masyarakat Desa boleh melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa. Dalam menjalankan tugas pembangunan Desa, kepala Desa mempunyai kedudukan selaku pemimpin Desa yang bertanggung jawab atas tercapainya pembangunan Desa.

Perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang rumit dan membutuhkan sumber daya yang tinggi baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Oleh karenanya penelitian tentang perencanaan pembangunan infrastruktur jalan berdasarkan kondisi dan potensi desa Pulau Sejuk ini menjadi penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana perencanaan pembangunan desa terkhususnya di bagian pembangunan infrastruktur jalan, program perencanaan pembangunan jalan sudah di rencanakan cukup baik untuk memperhatikan kondisi jalan Desa Pulau Sejuk namun untuk perencanaan pembangunan infrastruktur lainnya seperti drainase, leningan, pasar tradisonal sudah berjalan dengan baik sehingga masyarakat desa dapat menikmati fasilitas tersebut.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa senantiasa memperhatikan asas-asas pembangunan antara lain, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan

harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga desa pulau sejuk. Peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan masih belum dilaksanakan di karenakan kepala desa baru terpilih pada tahun 2019 dan bertepatan dengan dampak covid 19 sehingga pemerintahan desa masih terfokus ke bantuan sosial untuk warga desa yang terkena dampak dari virus covid 19. Di sisi lain pelaksanaan pembangunan fasilitas di bidang kesehatan, pendidikan, bantuan warga desa sudah sangat baik dilaksanakan.

Pengawasan pembangunan infrastruktur jalan di desa pulau sejuk oleh pemerintah desa dan BPD belum memperhatikan kembali akses jalan pedesaan sehingga masih banyak jalan yang belum pernah di perbaiki dan perlu perbaikan namun peranan kepala desa dalam pengawasan fasilitas lainnya sudah di lakukan oleh kepala desa, BPD dan masyarakat desa

Namun peranan Kepala Desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan belum terlaksana dikarenakan kurangnya kerja sama antara masyarakat Desa pulau sejuk dengan Kepala Desa ataupun aparat desa setempat dan masih kurangnya dana untuk pembangunan jalan. Jalan desa adalah jalan lokal primer yang berada di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan antar permukiman di dalam desa. Keberadaan jalan Desa Pulau Sejuk memperlihatkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Akses jalan dari dusun 1 ke dusun lainnya masih banyak jalan yang rusak dan belum dilakukan perbaikan kembali, akibatnya aktivitas masyarakat menjadi terganggu, pertumbuhan ekonomi melambat karena tidak termobilisasi hasil pertanian ke daerah lain.

Pada penelitian ini peneliti hendak melihat bagaimana peranan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastuktur Jalan Pada Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, data APBDes TA. 2022

**Tabel 1.1 Pendapatan APBdes 2022**

No	Pendapatan	Jumlah
1.	Pendapatan asli desa	Rp.0
2.	Dana desa	Rp. 855.780.000
3.	Alokasi dana desa	Rp. 398.743.466
4.	Bagi hasil pajak dan retribusi	Rp. 64.854.966
5.	Pendapatan lain	Rp. 51.000.000
6.	Silpa -2021	Rp. 4.291.937
<b>Total pendapatan</b>		<b>Rp. 1.374.670.369</b>

*Sumber data penelitian 2023*

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan Desa Pulau Sejuk pada tahun 2022 berada diangka 1,3 M dengan beberapa sumber pemasukan seperti dana desa, dari bagi hasil pajak dan retribusi, dana silpa pada periode 2021 (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Total pendapatan Desa Pulau Sejuk bernilai 1,3 M dan jika di alokasikan untuk pembangunan infrastruktur berupa jalan dana tersebut sangatlah minim dan masih kurang maksimal dalam proses pengerjaan infrastruktur jalan di Desa Pulau Sejuk.

Dalam menjawab rumusan masalah penulis mengambil teori peranan dari Soekanto, Sulistyowati (2017) menjelaskan peranan adalah suatu konsep apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam organisasi dan peranan juga dapat sebagai perilaku individu yang penting bagi struktural sosial masyarakat



karena dianggap mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Peranan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah ditulis dalam latar belakang, berikut ini adalah rumusan pertanyaan dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Peranan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat Peranan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peranan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat Peranan Kepala Desa Terhadap Pembangunan

Infrastruktur Jalan Pada Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

##### 1. Secara teoritis

Untuk menambah wawasan, memperdalam ilmu pengetahuan serta pengalaman dalam melakukan penelitian mengenai peranan kepala desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan pada Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

##### 2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan kepada pihak pemerintah Desa, dalam rangka usaha memaksimalkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan pedesaan.

## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Peranan

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara posisi dan peranan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan-terpisah karena satu bergantung pada lain dan sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa posisi atau posisi tanpa peranan. Seperti halnya posisi, Peranan juga memiliki dua arti. Setiap orang memiliki peranan yang berbeda yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Pada saat yang sama itu berarti bahwa peranan menentukan apa yang dilakukannya untuk masyarakat dan peluang apa yang diberikan masyarakat untuk dia.

Dalam penulisan proposal ini menggunakan teori Menurut (Soekanto, Sulistyowati (2017) menjelaskan peranan adalah suatu konsep apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam organisasi dan peranan juga dapat sebagai perilaku individu yang penting bagi struktural sosial masyarakat.

Peranan, “tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa”. sedangkan menurut Pariata Westa dalam Tuti (2003) mengatakan peranan dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang sesuatu hal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dapat disimpulkan peranan merupakan segala sesuatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk mencapai suatu hal yang telah ditentukan.

Menurut Ali (2000) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin penting keterampilan teknis yang diperlukan, Siswanto (2012).

Menurut David Berry (2003), mendefinisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma norma didalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh sipemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

## 2.2 Pemerintah Desa

Dari segi etimologi, kata Desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu berasal dari kata Deshi yang artinya “Tanah Kelahiran” atau “Tanah Tumpah Darah”. Selanjutnya dari kata Deshi itu terbentuk kata Desa (Kartohadikusumo, 1988) Desa adalah sebagai tempat tinggal kelompok atau sebagai masyarakat hukum dan wilayah daerah kesatuan administratif, wujud sebagai kediaman beserta tanah pertanian, daerah perikanan, tanah sawah, tanah panganon, hutan blukar, dapat juga wilayah yang berlokasi ditepi lautan/danau/sungai/irigasi/pegunungan, yang keseluruhannya merupakan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Hak Ulayat Masyarakat Desa (Kartohadikusumo, 1988).

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Widjaya (2013) menjabarkan Kepmendagri Nomor 64 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah “kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa BPD”. Menurut Soemantri (2010) Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu Sekretariat Desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18).

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa).

### 2.2.1 Kepala Desa

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, tetapi hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Peranan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa pulau sejuk kecamatan datuk lima puluh kabupaten batu bara dalam proses penetapan pelaksana pembangunan dilakukan oleh kepala desa berdasarkan peraturan dan pedoman yang ada, dan proses penetapan tersebut kepala desa memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan pelaksana pembangunan desa pulau sejuk.

Menurut Widjajah (2008) kepala desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Kepala Desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada Bamusdes, serta

menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban: memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada pemerintah melalui bupati dan tembusan camat, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, di bantu oleh lembaga adat desa, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya, mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa, menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa bersangkutan.

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab pada rakyat desa yang dalam tata cara prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada BPD, kepala desa wajib memberikan pelaporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban tersebut. Kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa (pilkades) oleh penduduk desa tersebut.

Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha (2011) merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa kepala desa mempunyai peranan dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan desa. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di desa. Seorang kepala desa merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya. Di samping menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan, kepala desa juga mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan dibidang kemasyarakatan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membina dan mengembangkan semangat gotong royong masyarakat.

### **2.2.2 Sekretaris Desa**

Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Sekretaris Desa Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD desa. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBD desa, perubahan APBD desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD desa. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD desa. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan



APBD desa. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBD desa (SPP). Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggung jawab kepada kepala desa.

### 2.2.3 Bendahara Desa

Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban (Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014).

Dari uraian diatas jelas sekali bahwa pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa berserta perangkat desa, dan dan Badan Permusyawaratan Desa yang dipercaya oleh masyarakat untuk bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa seperti mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat.

#### 2.2.4 Pengertian Pembangunan

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Setiap individu atau negara akan selalu bekerja keras untuk melakukan pembangunan demi Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan Negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar artinya pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan kelangsungan hidupnya untuk masa ini dan masa yang akan datang.

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan Negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar artinya pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional (S.P. Siagian 2005).

Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebagaimana dikemukakan oleh para para

ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan.

Menurut Todaro (1984) pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Tujuan utama pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berbagai bisnis dari berbagai perusahaan sektor ini terus dikembangkan dalam upaya mencapai tujuan tersebut. Namun, seringkali usaha dan niat baik tersebut tidak tercapai seluruh masyarakat, terutama yang berada di pedesaan. Selain itu banyak kerusakan lingkungan terjadi karena pemanfaatan yang berlebihan dalam mengejar target pembangunan tertentu dan juga melanggar norma kehidupan masyarakat pedesaan.

### **2.2.5 Faktor Pendukung Dan Penghambat Peranan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan**

Faktor Pendukung, sebagai pemerintah yang melaksanakan fungsi pemerintahan sebagai pengatur (regulasi) masyarakat, maka sudah selayaknya apabila seseorang Kepala desa mengetahui kondisi atau keadaan penduduknya yang sebenarnya. Sebab dengan mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya

maka dapat diambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil keputusan dan tindakan. Sebab jika pemimpin tidak mengetahui kondisi masyarakat maka akan menjadi suatu kesalah pahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. dalam pembangunan infrastruktur di desa sering lama yang di berikan hak, kewenangan kepada kepala desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sesuai dengan konsep otonomi desa, dengan melibatkan partisipasi aktif terlibat dalam pembangunan di desa dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di desa sesuai dengan keinginan masyarakat di desa dalam memajukan pembangunan di desa demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Faktor Penghambat, untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Desa membutuhkan fasilitas atau peralatan dalam menjalankan fungsinya, tersedianya fasilitas atau perlengkapan yang tersedia menunjang lancarnya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, di mana salah satu faktor itu adalah tersedianya kantor desa dalam menunjang terselenggaranya pemerintahan desa dan sebagai tempat dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan, pelaporan, pencatatan, dan berbagai kegiatan lainnya. Kegiatan masyarakat berdemokrasi dalam pembangunan dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas atau peralatan, misalnya dalam pertemuan atau rapat akan berjalan lancar jika tersedianya tempat beserta peralatannya. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana sangat menghambat kinerja pemerintah demi terselenggaranya pembangunan. faktor masyarakat yang majemuk dan sulitnya menerima perubahan, faktor partisipasi masyarakat dan faktor infrasturktur serta peralatan yang belum lengkap memang benar merupakan faktor penghambat.

### 2.3 Infrastruktur Jalan

Infrastruktur Jalan adalah suatu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Adapun pendapat lain yang mengungkapkan bahwa infrastruktur merupakan segala jenis fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat umum guna mendukung berbagai aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan arti lain, infrastruktur merupakan semua fasilitas, entah itu fisik ataupun non fisik yang dibangun oleh pihak pemerintah atau perorangan guna memenuhi keperluan dasar masyarakat dalam lingkup ekonomi dan sosial. pada Umumnya, infrastruktur merujuk pada pembangunan secara fisik untuk fasilitas umum, misalnya jalan raya, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, pengolahan limbah, air bersih, bandar udara, dan masih banyak lagi. Selain itu, infrastruktur juga bisa merujuk pada hal-hal yang teknis seperti mendukung kegiatan ekonomi dengan cara menyediakan moda transportasi, distribusi barang dan juga jasa, dan lain sebagainya.

Pengertian infrastruktur menurut Neil S. Grigg (1998) yaitu sebuah sistem fisik yang menyediakan sarana pengairan, drainase, transportasi, bangunan gedung, dan fasilitas fisik yang diperlukan untuk bisa memenuhi berbagai keperluan dasar manusia, baik kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial, Selain itu infrastruktur menurut Robert J. Kodoatie (2003) adalah suatu sistem yang menunjang sistem ekonomi dan sosial yang sekaligus menjadi perantara sistem lingkungan. Dimana sistem tersebut dapat digunakan sebagai salah satu

dasar dalam mengambil kebijakan. Infrastruktur berperan sangat penting yaitu sebagai salah satu roda penggerak untuk pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan. Kehadiran infrastruktur yang memadai memang sangat diperlukan. Sarana serta prasarana dalam bentuk fisik atau seringkali disebut dengan infrastruktur adalah bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat.

## 2.4 Sistem Infrastruktur

Menurut Grigg (1988), Sistem infrastruktur merupakan merupakan pendukung utamafungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2005, jenis Infrastruktur mencakup.

1. Infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
2. Infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
3. Infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;
4. Infrastruktur air minum yang meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;
5. Infrastruktur air limbah yang meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;

6. Infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi;
7. Infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik; dan
8. Infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi minyak dan gas bumi.

Menurut Undang-Undang No. 02 Tahun 2022, Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.

Klasifikasi jalan dibagi menurut fungsi, kelas jalan, medan jalan, dan wewenang pembiayaan jalan. Adapun klasifikasi menurut fungsi jalan terdiri atas 3 golongan yaitu:

1. Jalan arteri yaitu yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
2. Jalan kolektor yaitu jalan yang melayani angkutan pengumpul/pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang. Kecepatan rata-rata sedang dan jalan masuk dibatasi.
3. Jalan local yaitu jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi

Jalan memiliki tujuan dan fungsi bagi perekonomian suatu daerah. Tujuan dan fungsi tersebut antara lain:

1. Dapat membuka akses atau jalan masuk dari suatu daerah ke daerah lainnya, yang disebut sebagai fungsi *lineaccess*. Fungsi sangat penting untuk meningkatkan PDRB dan mengurangi daerah yang tertinggal.
2. Jalan berfungsi untuk pelayanan masyarakat setempat. Pada fungsi ini jalan dapat memberikan jasa-jasanya dalam proses pendistribusian produk dan ekonomi lainnya.
3. Jalan dapat memberikan pelayanan bagi angkutan masyarakat jarak jauh dan antar daerah .yang berfungsi sebagai *interchangecommunityand long transportation*.

## 2.5 Pengertian Desa

Kata Desa sendiri berasal dari bahasa India yakni “*swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto (jo.) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian otonomi daerah dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Pengertian lebih luas dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari



ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.

Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Seperti yang dikemukakan Widjaja (2002). Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, mengamanatkan “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut R.H Unang Soenardjo (dalam Nurcholis, 2011) desa adalah sesuatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetapkan dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus

yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Dari pernyataan diatas, dapat dikatakan bahwa desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada dinegeri ini luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga, mayoritas penduduknya bekerja dibidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, maka biasanya hubungan kekerabatan antar masyarakatnya terjalin kuat. Para masyarakat nya juga masih percaya dan memegang teguh adat dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur mereka.

## 2.6 Otonomi Desa

Widjaja(2012) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "*Development Community*" dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai "*Independent Community*" yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara

mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha menjelaskan sebagai berikut:

Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa,

urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

## 2.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa tinjauan penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil penelitian yang dijadikan pembanding tidak terlepas dari topik penelitian tentang peranan kepala desa terhadap pembangunan infrastuktur jalan pada Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Berikut adalah uraian penelitian terdahulu yang digunakan peneliti.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti, Judul Penelitian Dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan/ Persamaan
1	Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infra Struktur Desa Mensanak Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga, Jepri Tahun 2015	Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini informan terdiri dari dua belas orang. Teknik analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif.	Peran Pemimpin sesuai dengan uraian pekerjaan. Peran pemimpin menjalankan tanggung jawabnya dalam meningkatkan pembangunan desa. Dalam peran ini Kepala Desa sudah berperan dalam meningkatkan pembangunan walaupun masih ada masyarakat yang tidak ikut keterlibatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.	Persamaan Menggunakan metodesurvei kualitatif.  Perbedaan Tempat dan waktu penelitian yang berbeda.
2	Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, Bakhtiar April 2021	Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini informan terdiri dari sembilan orang. Teknik analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah	Peran Kepala Desa dalam pembangunan Desa di Kecamatan Mekarsari sebagai pelopor, innovator dan stabilisator dengan melakukan berbagai perencanaan, usulan dan tindakan dalam mencapai tujuan pembangunan	Persamaan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.  Perbedaan Tempat dan waktu penelitian yang berbeda.

		teknik analisa kualitatif,	Desa yang lebih baik. Hasil pembangunan terlihat dengan adanya beberapa pembangunan seperti Jalan, Jembatan dan pembangunan.	
3	Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kecemen Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten Novi Yogawati, Juni 2022,	Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan, dan dari dokumen-dokumen tertentu yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data menggunakan model analisa interaktif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pilar pembangunan sekaligus sebagai pihak ketiga atau pihak swasta bertujuan meningkatkan pelayanan masyarakat, mendorong pemberdayaan untuk peningkatan produksi, pendapatan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat warga Kecemen yang sejalan dengan prinsip demokrasi. Peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur sudah cukup baik namun perlu untuk ditingkatkan agar lebih optimal dilihat dari perannya sebagai motivator, fasilitator dan innovator. Respon masyarakat adalah menyadari bahwa kesempatan yang diberikan oleh Kepala Desa dan pemerintah desa dalam partisipasinya merupakan perwujudan dari kesadaran, kepedulian dan tanggung jawabnya yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka.	Persamaan Menggunakan deskriptif kualitatif  Perbedaan Tempat dan waktu penelitian yang berbeda dan hasil penelitian.
4	Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, Wawan, 2021	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Sementara itu, analisis data yang digunakan yaitu analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara	Berdasarkan hasil penelitian diketahui Kepala Desa Pulau Busuk belum mampu menunjukkan perannya dalam membuat perencanaan pembangunan jangka menengah desa yang mengakibatkan masih banyaknya program	Persamaan Menggunakan metode deskriptif kualitatif, meneliti peranan kepala desa  Perbedaan tempat waktu, lokasi penelitian dan hasil wawancara penelitian

		bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.	RPJM Desa belum terselesaikan dengan tepat waktu. Kepala Desa Pulau Busuk sudah berperan cukup baik karena pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan perencanaan pembangunan. Tetapi dalam pelaksanaannya belum melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap dana desa yang dikeluarkan untuk satu kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut. Pengawasan pembangunan infrastruktur desa Kepala Desa Pulau Busuk memiliki peran yaitu melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan dimana lokasi pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan.	
5.	Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) Di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa,Indrasto Wahyudi Dahlan, 2012	Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang menitik beratkan pada proses pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi,wawancara dan dokumentasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Pemerintah Desa sudah dapat dikatakan berperan aktif dengan indikator yaitu: adalah memfasilitasi yang dimana Pemerintah Desa memberikan fasilitas pada musyawarah desa, transparansi pelaksanaan, dan fasilitas penunjang untuk OMS. Keterlibatan masyarakat yang dimana Pemerintah Desa berusaha dan bekerja sama dengan pihak pengelola untuk mengutamakan keterlibatan masyarakat; mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan PIIP.	Persamaan Menggunakanpendekatan deskriptif kualitatif  Perbedaan lokasi penelitian . objek yang di teliti dan hasil penelitian, waktu penelitian
6	Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pematang	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan terdiri dari informan utama,	Hasil penelitian menunjukkan peranan dalam pembangunan infrastruktur sudah berjalan dengan lancar	Persamaan mennggunakan teori yang dipakai.  Perbedaan waktu,hasil penelitian, lokasi

	PanjangKecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Oleh :Rowlando Houtsma Siboro	informan kunci dan informan tambahan.	dan baik dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan dengan usaha usaha yang dilakukan.	penelitian
--	---	--	--	------------

## 2.8 Karangka Berpikir

Teori peranan dari (Soekanto, Sulistyowati (2017) menjelaskan peranan adalah suatu konsep apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam organisasi dan peranan juga dapat sebagai perilaku individu yang penting bagi struktural sosial masyarakat indikator-indikator peranan menurut Soekanto, Sulistyowati diantaranya yaitu, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan.

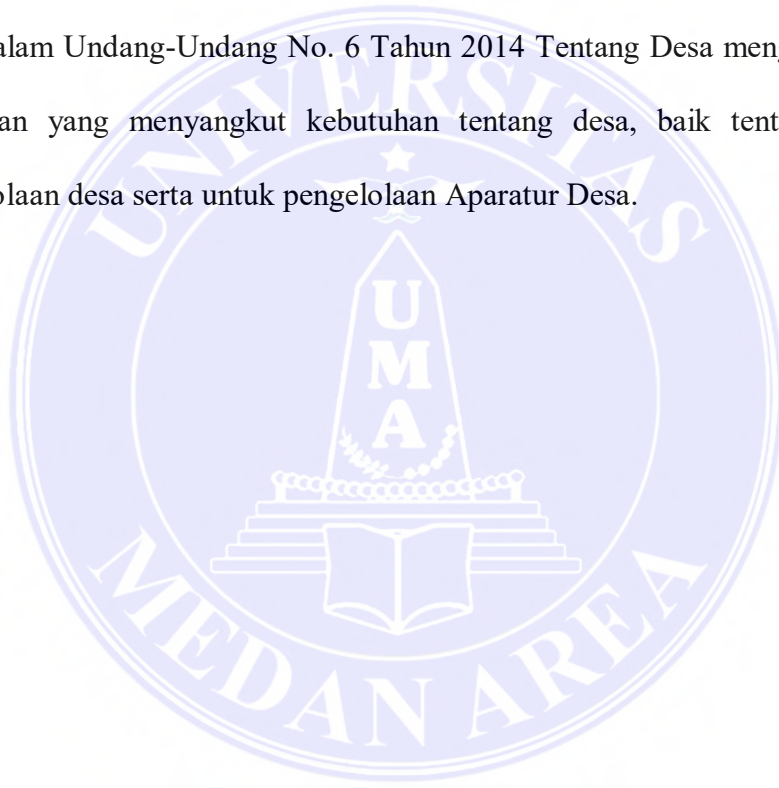
Kepala desa sebagai seorang pemimpin memiliki peran yaitu mempengaruhi, memotivasi, mengerahkan, dan komunikasi. Peran kepemimpinan tersebut berhubungan dengan Tujuan Bumdes yaitu meningkatkan pendapatan desa, kebutuhan pokok desa, dan menjadikan desa sebagai desa mandiri. Peranan Kepala desa yang dimaksudkan adalah bahwa kepala desa dalam menjalankan perannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Kepala desa diberi tugas untuk menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai peranan Kepala Desa terhadap pembangunan infrasruktur jalan pada Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

dikarenakan dapat dilihat bahwa infrastruktur jalan di desa Pulau sejuk belum memadai sebahagian jalan yang masih rusak salah satunya akses jalan yang rusak terletakpada ruas jalan 500 km, sampai di

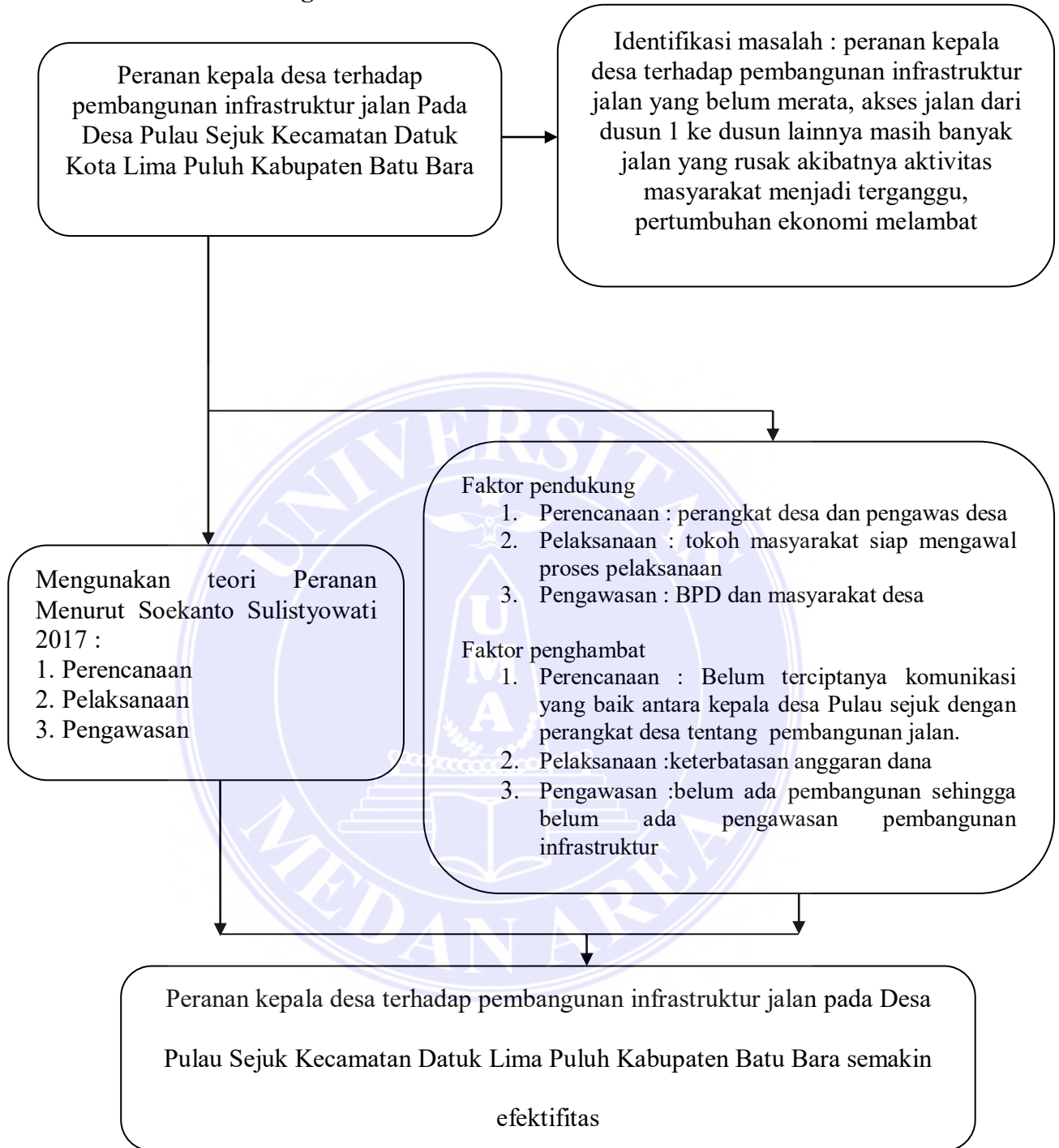
persimpangan memasuki kampung dalam perkiraan 78 km. Pembangunan Infrastruktur di Desa Pulau sejujuki adalah sangat penting dan meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sekaligus merupakan proses pengembangan pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan Negara. Pencapaian dari penelitian ini menunjukkan peranan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan yang sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan agar lebih optimal, hal ini dapat dilihat pada aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur berbagai persoalan yang menyangkut kebutuhan tentang desa, baik tentang tata cara pengelolaan desa serta untuk pengelolaan Aparatur Desa.





**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**



*Sumber: Peneliti 2023*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fakta serta keterangan-keterangan yang ada di lapangan, sedangkan deskriptif ialah sifat data penelitian data kualitatif yang wujud datanya berupa deskriptif objek penelitian yaitu kata-kata, gambar, dan angka-angka yang tidak dihasilkan melalui pengelolaan statistika. Metode penelitian kualitatif juga sering di sebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) yang di sebut juga sebagai metode etnographi. Karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya yang disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiono, 2011).

Menurut Rogman dan Taylor dalam Moelong (1990) metode penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik/utuh. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan data angka, karena data yang ditulis

penelitian ini berupa hasil wawancara mengenai peranan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan Desa Pulau Sejuk Kabupaten Batu Bara yang berasal dari narasumber langsung, data hasil observasi dilapangan, dokumen mengenai peranan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur desa pulau sejuk kabupaten batu bara, serta catatan penelitian dokumen lainnya yang mendukung.

### 3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Pulau Sejuk. Jl. Datuk Lima Puluh, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara 21255, waktu penelitian 06 february 2023 sampai 28 ferbruari 2023.

**Tabel 3.1 Waktu Penelitian**

No	Uraian Kegiatan	2022				2023							
		09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08
1.	Pengajuan Judul												
2.	Penyusunan Proposal												
3.	Seminar Proposal												
4.	Perbaikan Proposal												
5.	Pengambilan Data/Penelitian												
6.	Penyusunan Skripsi												
7.	Seminar Hasil												
8.	Perbaikan Skripsi												
9.	Sidang Meja Hijau												

*Sumber: Peneliti 2023*

### 3.3 Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Suyanto,2005). Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses penelitian. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Menurut Bagong (Suyanto 2005) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu :

1. Informan kunci (key informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan utama, infroman yaitu diantaranya :

**Tabel 3.2 Daftar Informan**

No	Nama Informan	Jenis Informan	Keterangan
1	Bapak Siswanto S.Pd.I	Informasi Kunci	Kepala desa
2	Bapak Yofrizal Sidik, S.I.Pust	Informasi Utama	Sekretaris
3	Riswanda	Informan Tambahan	Kaur Pemerintah
4	Sri WahyunI, S.Pd,	Informan Tambahan	Kaur Keuangan
5	Jeni Rifal Nst, S.Agt,	Informan Tambahan	Kaur Perencanaan
6	Dedi, Sawal, Julpan	Informan Tambahan	Masyarakat desa pulau sejuk

*Sumber : peneliti 2023*

### 3.4 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2010) Sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu: 1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara atau mengisi kuesioner yang artinya sumber data ini langsung memberikan data kepada peneliti. 2. Data Sekunder yaitu peneliti tidak langsung menerima dari sumber data. Sumber data akan diambil dari dokumen, hasil wawancara, catatan lapangan dan hasil dari observasi.

#### a. Data primer

Data primer ialah data yang diperoleh penelitian secara langsung dari sumber aslinya (data itu diperoleh tanpa ada perantara dari sumbernya), yaitu data

yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Adapun data yang diperoleh berupa opini subjek individual, kelompok atau hasil obsevasi terhadap sesuatu keadaan serta kejadian juga problem yang ada dalam peranan kepala desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa di kantor Kepala Desa Pulau Sejuk Kabupaten Batu Bara.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh penelitian secara tidak langsung dari sumber aslinya (data/informasi yang didapatkan melalui pihak ketiga), seperti data yang diperoleh dari lembaga atau institusi yang ada dan atau ada kaitannya dengan peranan kepala desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan Desa Pulau Sejuk berupa catatan atau laporan harian yang telah tersusun arsip (data dokumen) baik yang dapat dipublikasikan maupun yang tidak dapat dipublikasikan.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2010) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk memperoleh data atau informasi yang mendukung tujuan penelitian, penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

a. Obsevasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian kemudian mencatat gejala-gejala yang ditemukan dilapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan acara untuk berkaitan dengan permasalahan penelitian menurut Sutrisno Hadi Sugiyono

(2010:) peneliti akan melakukan observasi di Kantor Desa Pulau Sejuk untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan hal yang diteliti.

b. Wawancara

Menurut sugiyono (2010) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Peneliti akan melakukan wawancara pada informan yang berkaitan dan mengetahui hal yang berkaitan dengan yang akan diteliti di kantor Kepala Desa.

c. Dokumentasi

Menurut sugiyono (2010) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Peneliti melakukan teknik ini untuk mendapatkan data yang berhubungan di kantor Desa Pulau Sejuk yang didapatkan berupa data, gambar, dan tulisan.

### 3.6 Defenisi Konsep Dan Oprasional

#### 3.6.1 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan diatas dapat dikemukakan defenisi konseptual sebagai berikut:

a. Peranan

Perananandari (Soekanto, Sulistyowati,2017) menjelaskan peranan adalah suatu konsep apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam organisasi dan peranan juga dapat sebagai perilaku individu yang penting bagi struktural sosial masyarakat yaitu pelaksanaan, perencanaan, pengawasan

b. Kepala Desa

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyaiwewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

c. Pembangunan infrastruktur jalan

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan sebagai langkah untuk membangun manusia Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kebijakan yang akan diambil yang berkaitan dengan pembangunan harus tertuju pada pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat agar hasil pembangunan tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia.

### 3.6.2 Defenisi Oprasional

Zeithaml dkk dalam Hardiyansyah (2018).Agar konsep data diteliti secara empris, maka konsep tersebut harus dioperasionalisasikan dengan cara mengubahnya menjadi sesuatu yang mempunyai nilai.



Menurut teori Peranan Menurut Soekanto Sulistyowati (2017) ada 3 indikator

1. Perencanaan merupakan proses menentukan tindakan masa depan secara tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang telah tersedia untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Pelaksanaan merupakan suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataan.
3. Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan mendukung pencapaian hasil kinerja yang diharapkan sesuai dengan yang sudah direncanakan.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2010) yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Menurut Miles & Huberman (1992) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini diantaranya :

1. Pengumpulan Data

Dalam hal ini Peneliti melakukan pengumpulan data penelitian berupa hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dilapangan secara obyektif.

2. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Peranan kepala desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

3. Penyajian data (*Data Display*)

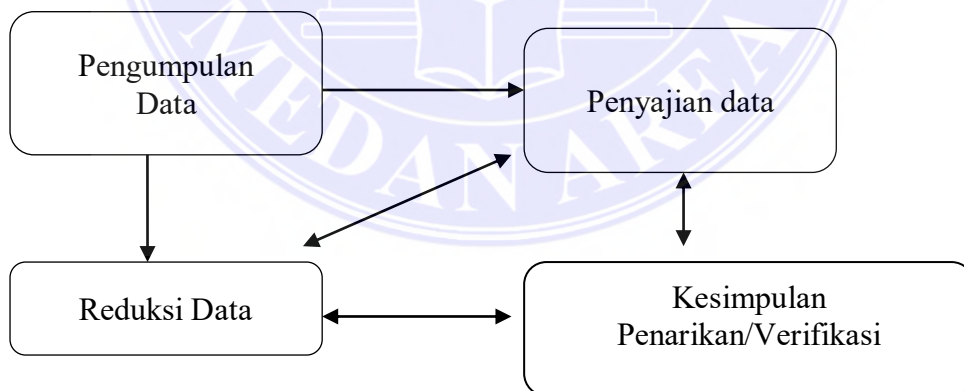
Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis data adalah penyajian data dalam bentuk sekumpulan informasi yang tersusun secara lebih sistematis yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Ini akan memudahkan peneliti untuk menjelaskan hasil yang dipelajari dan mencapai kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing Verification*)

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan

intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut: gambaran tentang penelitian peranan kepala desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan pada desa Kecamatan Datuk Lima Puluh kabupaten Batu Bara berdasarkan hasil penelitian ini. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah ketiga dari analisis dalam penelitian ini.

**Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data**



*Sumber : Model Analisis Data Miles Humbermn*

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Dari tiga indikator yang digunakan dapat disimpulkan bahwa, peranan kepala desa dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan sudah direncanakan dengan baik namun dalam pelaksanaan pembangunan jalan masih belum dilaksanakan dan untuk pengawasan secara langsung maupun tidak langsung kepala desa dengan aparatur desa dalam pembangunan jalan belum terlaksana dikarenakan belum ada perbaikan jalan.
2. Faktor pendukung Perencanaan : perangkat desa dan pengawas desa ,Pelaksanaan : tokoh masyarakat siap mengawal proses pelaksanaan, Pengawasan : BPD dan masyarakat desaFaktor penghambat Perencanaan : Belum terciptanya komunikasi yang baik antara kepala desa Pulau sejuk dengan perangkat desa tentang pembangunan jalan, Pelaksanaan :keterbatasan anggaran dana, Pengawasan:belum ada pembangunan sehingga belum ada pengawasan pembangunan infrastruktur

## 5.2 Saran

Adapun saran penulis berikan sebagai masukan dalam Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, adalah sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Datuk Lima Puluh untuk menambah anggaran desa Pulau sejuk sehingga pembangunan infrastruktur jalan desa Pulau Sejuk berjalan sesuai dengan perencanaan, Kepada Kepala Desa Pulau Sejuk harus memperhatikan pembangunan jalan agar pelaksanaan infrastruktur dapat berjalan dengan baik.
2. Harus terciptanya komunikasi yang baik antara pemerintah Desa Pulau Sejuk dengan perangkat desa sehingga bisa saling bekerja sama dalam melakukan pembangunan infrastruktur Desa Pulau Sejuk

## DAFTAR PUSTAKA

### SumberBuku

- A.W. Widjaja. 2002. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ali, Muhammad. ( 2000 ). *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi. Bandung : Angkasa*
- Amin Widjaja Tunggal. (2013). *Pokok-pokok Auditing dan Jasa Asurans. Jakarta: Harvindo.*
- Amin Widjaja, 2008, *Dasar Dasar Customer Relationship. Management. Harvarindo, Jakarta.*
- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial. Jakarata : Kencana Prenanda MediaGroup.*
- Bambang Trisantono Soemantri, 2010, “*Pedoman Penyelenggaraan PemerintahanDesa*”, Fokusmedia, Bandung.
- Berry, David. (2003). *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Grigg, N. 1988, *Infrastructure Engineering and Management*, John Wiley& Sons.
- Grigg, N. 1988, *Infrastructure Engineering and Management*, John Wiley & Sons.
- Hardiansyah. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Gava Media
- Kartohadikusumo. 1988. *Desa*. Jakarta:Sinar Harapan.
- Kodoatie, Robert J., 2003, *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*, Pustaka Pelajar,Yogyakarta.
- Lexy J. Moleong. 1990. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*.Yogyakarta: C.V ANDI
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.

- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pariata Westra dkk, 2003, *Ensiklopedia Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung
- Siswanto, 2012. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta Bumi: Aksara.
- Soekanto, Soejono, Sulistyowati, & Budi. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soejono. 2012 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Soenardjo, R.H. Unang, (1984). *Tinjauan Singkat Tentang: Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Tarsito, Bandung
- Sondang P.Siagian, 2005. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: CV. Gunung Agung
- Sugiyono (2011). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tikson, T. Deddy. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Makassar : Gemilang Persada
- Todaro, Michael P, 1984, *Ekonomi Pembangunan Di Dunia Ketiga*, Erlangga. Jakarta.
- Widjaja, HAW. (2012) *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta ,PT. RajaGrafindo Persada

## Jurnal

- Alokendek, R. C., Kimbal, M. L., & Undap, G. (2017). Peran Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Pembangunan Infrastruktur di Desa Darunu Kecamatan Wori. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1).
- Bakhtiar, B., & Gadi, R. (2021). PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN MEKARSARI KABUPATEN BARITO KUALA. *AL-ULUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(1).
- Dahlan, I. W., Parawangi, A., & Muhiddin, A. (2012). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) Di

DesaSendanaKecamatanMambiKabupatenMamasa.  
Otoritas:JurnalIlmuPemerintahan, 2(1).

Yogawati, N., & Aco, F. (2022). Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kecemen Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten. *Jurnal EnersiaPublika: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*, 6(1), 59-78.

### Skripsi

Hanafi, H. (2019). *Analisis Tingkat Kepuasan Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara* (Doctoraldissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Siboro, R. H. (2022). *Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Wawan, W. (2021). *Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi* (Doctoraldissertation, Universitas Islam Riau).

Wildasari, W., Setiawati, B., & Mone, A. (2020). Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(2), 497-514.

### Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 02 Tahun 2022 Tentang Jalan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



## Lampiran 1 Pedoman Wawancara

1. Bagaimana Peranan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara?

### Indikator Perencanaan

- a. Bagaimana perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Dalam Meningkatkan pendapatan asli daerah PAD Pada Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara?
- b. Apa saja yang dilakukan dalam rencana pembangunan jangka menengah di desa pulau sejuk ini?
- c. Program-program apa sajakah yang terdapat dalam rencana kerja pemerintah desa di desa pulau sejuk ini?
- d. Apakah perencanaan pembangunan desa sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pedoman pembuatan rencana pembangunan desa?
- e. Bagaimana perencanaan pembangunan tahunan desa?

### Indikator Pelaksanaan

- a. Bagaimana pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Dalam Meningkatkan pendapatan asli daerah PAD Pada Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara?
- b. Selama bapak menjabat sebagai kepala desa, apa saja pembangunan infrastruktur jalan yang sudah terlaksanakan ?
- c. Apakah pembangunan infrastruktur di desa pulau sejuk ini sudah sesuai dengan RKP desa?
- d. Apakah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur sudah melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap dana desa?


### Indikator Pengawasan

- a. Bagaimana pengawasan dari Peranan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Dalam Meningkatkan pendapatan asli daerah PAD Pada Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara?
  - b. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa pulau sejuk ini?
  - c. Apakah dalam pembangunan infrastruktur jalan ini sudah dilakukan evaluasi?
  - d. Apakah dalam pembangunan infrastruktur jalan ada melibatkan masyarakat desa pulau sejuk ini?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat Peranan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara?
    - a. Faktor apa yang mendukung dan menghambat perencanaan dalam Peranan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara?

- b. Faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan dalam Peranan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara?
- c. Faktor apa yang mendukung dan menghambat pengawasan dalam Peranan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara?



**Lampiran 2 Surat izin penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**Kampus I** : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223  
**Kampus II** : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225802 ☎ (061) 8226331 Medan 20122  
**Website:** www.uma.ac.id **E-Mail:** univ\_medanarea@uma.ac.id

---

Nomor : 003 / FIS.2/01.10/II/2023 5 Januari 2023  
Lamp : -  
Hal : Pengambilan Data/Riset

Yth,  
**Kepala Desa Pulau Sejuk  
Di Tempat**

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :


Nama : Arifah  
N P M : 198520190  
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di **Kantor Desa Pulau Sejuk**, dengan judul Skripsi "*Peranan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara*"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

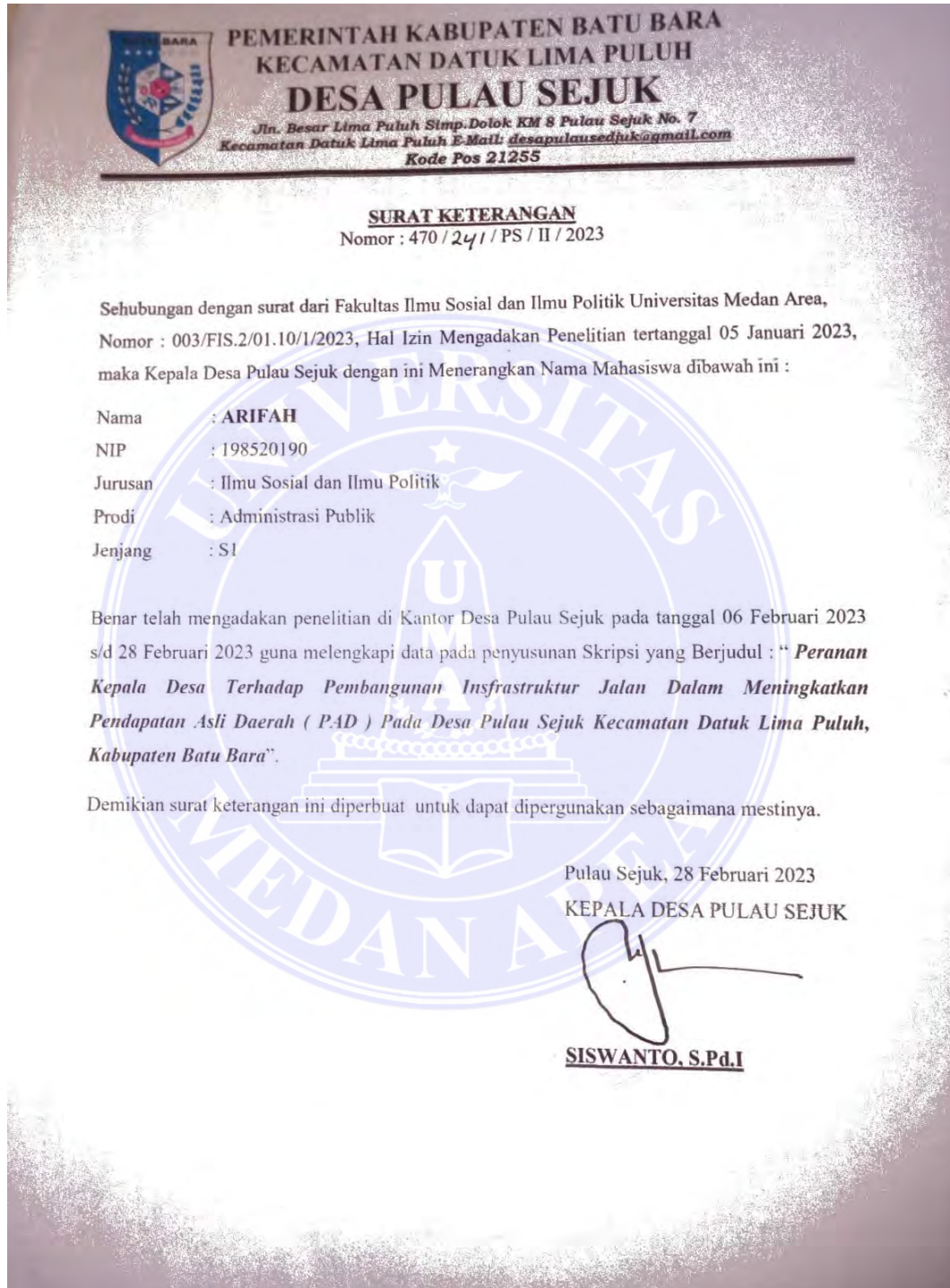
Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
**Dr. Effiat Juliana Hasibuan, M.Si**

CC : File,-

## Lampiran 3 Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian Dari Kantor Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara



## Lampiran 4 Dokumentasi penelitian



**Gambar. kantor desa pulau sejuk**

PENDAPATAN	
PENDAPATAN ASLI DESA	Rp. 0
DANA DESA	Rp. 855.780.000
ALOKASI DANA DESA	Rp. 398.743.466
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI	Rp. 64.854.966
PENDAPATAN LAIN-LAIN	Rp. 51.000.000
BLAK 2021	Rp. 4.291.937
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>Rp. 1.374.670.369</b>

* Pokok Dana Desa + Alokasi Dana Desa + Bagi Hasil Pajak dan Retribusi + SILPA-2021	
<b>REVENUE PERCENTAGE DISTRIBUTION</b>	<b>Rp. 526.370.274</b>
Keperluan Mula-mula, Penyelenggaraan, Pemeliharaan, dan Operasional Pemerintahan Desa	Rp. 501.515.308
Keperluan Mula-mula dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 13.854.966
Keperluan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Sosial & Kemanusiaan	Rp. 8.800.000
Keperluan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 2.400.000

REVENUE PERCENTAGE DISTRIBUTION	
Keperluan Mula-mula	Rp. 126.174.956
Keperluan Penyelenggaraan	Rp. 48.800.000
Keperluan Mula-mula dan Penyelenggaraan	Rp. 98.018.692
Keperluan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 2.500.000
Keperluan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 19.200.000
Keperluan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 4.557.400

REVENUE PERCENTAGE DISTRIBUTION	
Keperluan Mula-mula	Rp. 156.370.274
Keperluan Penyelenggaraan	Rp. 22.100.000
Keperluan Mula-mula dan Penyelenggaraan	Rp. 4.970.000
Keperluan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 129.300.000
Keperluan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 308.114.000
Keperluan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 37.000.000
Keperluan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 371.150.000
Keperluan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 345.600.000
Keperluan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 345.600.000
<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>Rp. 1.374.670.369</b>

Gambar P-APBdes 2022



Gambar. Dokumentasi Ruang Pelayanan Kantor Desa Pulau Sejuk



**Gambar . Dokumentasi Wawancara Dengan Kepala Desa Pulau Sejuk.**



**Gambar . Dokumentasi Wawancara Dengan Sekretaris Dan Kaur, Kasi Desa Pulau Sejuk**





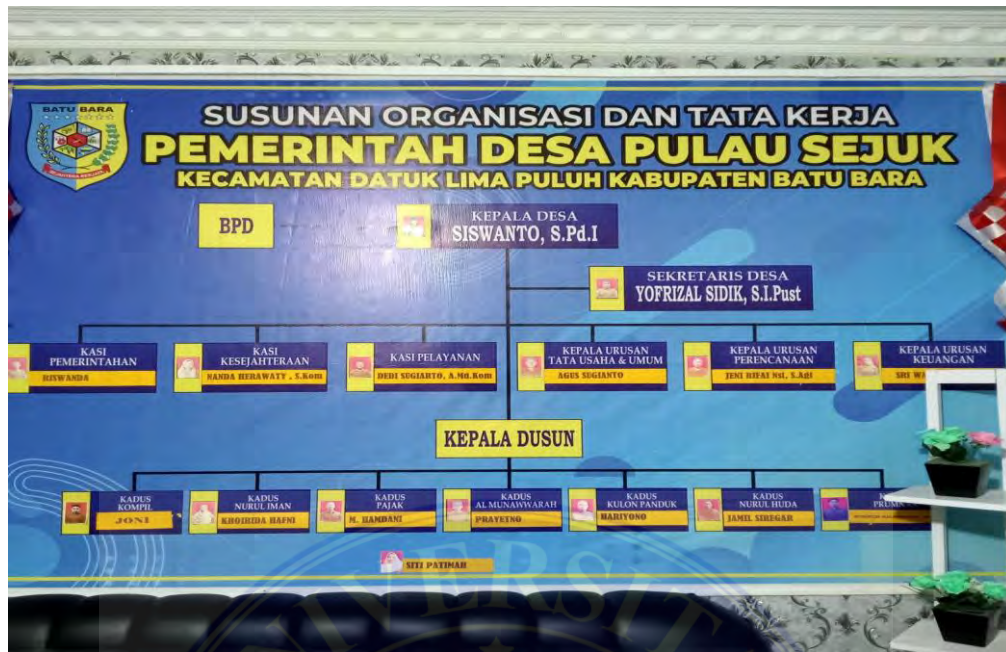
**Gambar. Dokumentasi Wanwacara Dengan Warga Desa Pulau Sejuk**



**Gambar . Dokumentasi Keadaan Jalan Desa Pulau Sejuk**



**Gambar kondisi jalan pertanian dan akses jalan antar dusun dsesa pulau sejuk**



Gambar. Struktur Organisasi Kantor Desa Pulau Sejuk

